

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemanasan global atau *Global warming* adalah permasalahan yang menjadi perhatian publik selain pandemi covid-19. WMO (Organisasi Meteorologi Dunia) menjelaskan konsentrasi gas karbondioksida terus meningkat setiap periode sehingga memicu terjadinya pemanasan global dan menjadi topik penting. Dikutip temuan *National Oceanic and Atmospheric Agency* atau NOAA, dijelaskan bahwa suhu lapisan permukaan bumi rata-rata pada tahun 2017 mencapai 0,56 derajat *celcius* dari suhu rata-rata di permukaan bumi dan tinggi permukaan air laut mengalami peningkatan.

Penelitian Tana & Diana (2021) menyatakan bahwa pelaku usaha industri adalah pemain terbesar penyumbang emisi karbon di atmosfer bumi yang mengakibatkan pemerintah dan *stakeholder* atau pemangku kepentingan sangat memperdulikan permasalahan ini. Pentingnya kasus terkait emisi karbon membuat para *stakeholders* melihat kinerja suatu perusahaan secara lebih menyeluruh mulai dari kinerja terkait keuangan perusahaan secara keseluruhan sampai dengan kinerja lingkungan.

Di era globalisasi saat ini, perkembangan dunia industri berkembang begitu pesat di mancanegara begitupun didalam negeri yang sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Perbincangan ini membahas mengenai masalah lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh *Global Warming*/pemanasan

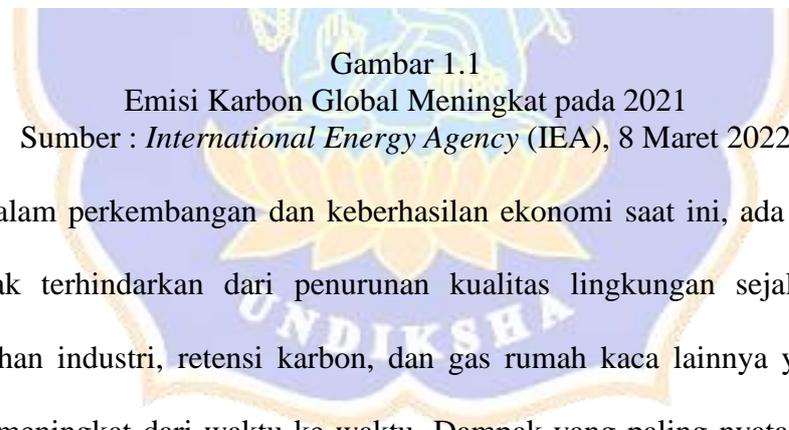
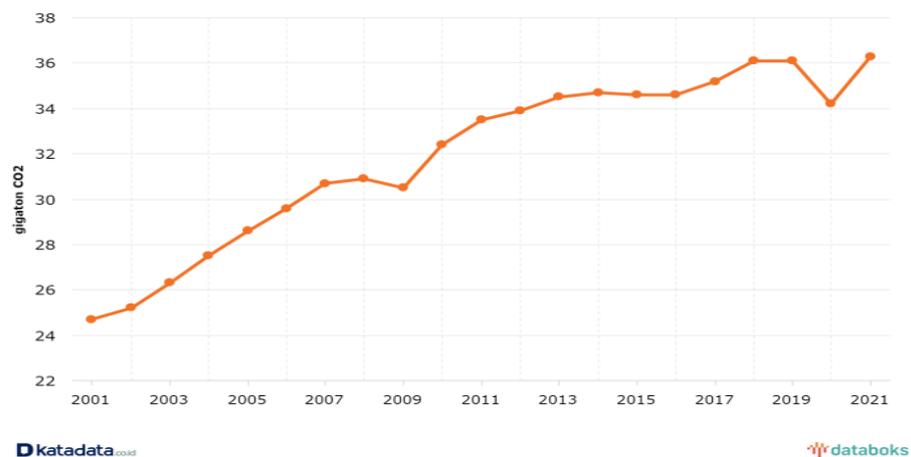
global. Menurut penelitian Pratama (2021) akibat dari pemanasan global inilah yang akan mengakibatkan perubahan iklim.

Perubahan iklim merupakan salah satu akibat dari keberadaan emisi yang terus menerus meningkat dari aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia. Penelitian Wibowo et al. (2022) menyatakan bahwa emisi yang menjadi perhatian dunia baik negara maju maupun berkembang saat ini adalah emisi gas rumah kaca (GRK) dan penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO). Gas rumah kaca (GRK) mencakup GRK langsung maupun tidak langsung. GRK langsung yang paling penting adalah karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrous oksida (N₂O), sedangkan GRK tidak langsung yang paling penting adalah belerang dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan senyawa organik volatil non-metana (NM-VOCs).

Karbon dioksida (CO₂) merupakan penyumbang utama faktor penyebab GRK karena kandungan gas inilah yang paling banyak ditemukan di atmosfer. Menurut catatan *International Energy Agency* (IEA), pada 2020 emisi karbon di skala global sempat menurun akibat masifnya pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai negara terkait pandemi Covid-19. Namun, kendati pandemi masih berlangsung, pada 2021 emisi karbon global kembali naik hingga mencapai 36,3 gigaton CO₂ dan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Emisi karbon pada 2021 meningkat sekitar 6% dari tahun 2020, beriringan dengan pemulihan ekonomi global yang tumbuh sebesar 5,9% dalam periode sama.

IEA mencatat emisi karbon global pada 2021 paling banyak berasal dari pembakaran batu bara dan gas alam. Sedangkan emisi karbon dari pembakaran BBM kendaraan dinilai menurun, bahkan lebih rendah 8% dari level pra-pandemi.

Untuk merespon masalah ini IEA menekankan untuk perlunya penguatan investasi yang berkelanjutan di bidang teknologi energi baru dan terbarukan (EBT). IEA pun menegaskan bahwa dunia harus selalu berupaya mengurangi emisi CO₂ pada tahun 2022, serta mengejar target nol-emisi pada 2050. Hal ini sesuai dengan data yang ditunjukkan dari gambar grafik 1.1 dibawah ini:

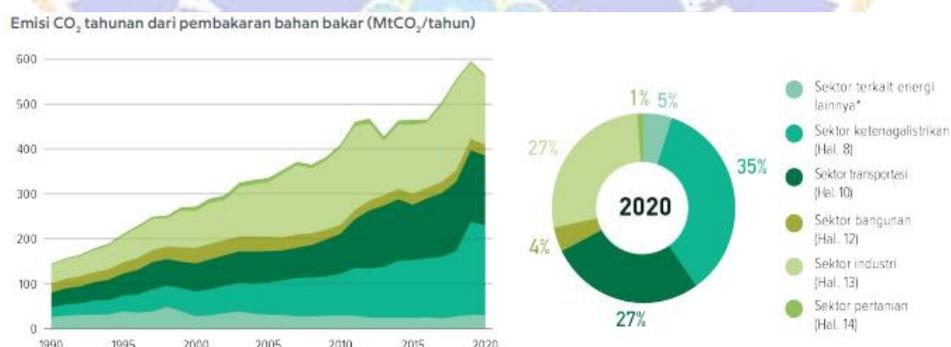


Gambar 1.1
Emisi Karbon Global Meningkat pada 2021
Sumber : *International Energy Agency (IEA)*, 8 Maret 2022

Di dalam perkembangan dan keberhasilan ekonomi saat ini, ada efek buruk yang tidak terhindarkan dari penurunan kualitas lingkungan sejalan dengan pertumbuhan industri, retensi karbon, dan gas rumah kaca lainnya yang secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu. Dampak yang paling nyata dari kedua situasi ini adalah pada lingkungan. Berdasarkan penelitian Purnayuda N (2022) menyatakan bahwa sebagai bentuk perhatian dunia terhadap permasalahan ini, maka diterbitkanlah Protokol Kyoto (1997) di Jepang yang mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional dimana sejumlah negara-negara yang meratifikasi protokol tersebut dan berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima

gas rumah kaca lainnya. Perhatian ini juga didorong oleh pendapat masyarakat yang mendorong pemerintah agar bisa mengambil tindakan terhadap isu global ini.

Faktanya, Indonesia turut menyumbang peningkatan emisi karbon yang tinggi. Pada tahun 2021, data *Carbon Brief* menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia yang mencapai 102,562 GtCO₂. Artinya, Indonesia juga berperan terhadap perubahan lingkungan global. Menurut *National Aeronautics and Space Administration* (2020) aktivitas revolusi industri menyebabkan peningkatan emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Emisi karbon (gas rumah kaca) dihasilkan lebih dari 95% selama 50 tahun terakhir dan mengakibatkan suhu bumi naik tajam.



Gambar 1.2
Emisi CO₂ Terkait Energi Menurut Sektor
Sumber : Enerdata, 2021

Gambar 1.2 menunjukkan pendorong terbesar dari keseluruhan emisi gas rumah kaca adalah emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar. Sektor pembangkit listrik adalah kontributor terbesar yaitu sebanyak 35%, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi masing-masing sebesar 27%. Disisi lain menurut penelitian Nastiti & Hardiningsih (2021) menyatakan bahwa sektor industri

merupakan sektor terbesar penyumbang emisi karbon, karena sektor industri menggunakan sekitar 70% energi fosil dari total semua energi yang digunakan.

Menurut Sekarini & Setiadi (2022) pesatnya pertumbuhan industri yang berakibat pada alam dan kelestarian makhluk hidup dimana keberadaan hutan yang sebelumnya untuk menyerap gas rumah kaca banyak dialihfungsikan sebagai lahan industri yang menyebabkan gas rumah kaca itu sendiri. Para Pelaku usaha dari berbagai sektor ingin memperoleh profit yang tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat karbondioksida di Indonesia. Kondisi tersebut akan terus mengalami peningkatan jika tidak ada kesadaran dari para pelaku usaha tersebut akan dampak dari emisi karbon yang dihasilkan.

Kehadiran industri membuat dilema karena setiap industri pasti menghasilkan limbah dan limbah bila tidak dikelola dengan baik sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan semua makhluk hidup di sekitarnya. Limbah industri yang membahayakan pasti tidak ramah lingkungan sehingga tidak akan membuka pintu kesejahteraan melainkan membuka pintu kehancuran bagi semua makhluk hidup terutama manusia karena kesehatan manusia akan terganggu. Penelitian Putra (2022) mengungkapkan sedikitnya ada delapan sektor industri sebagai penyumbang emisi karbon dalam jumlah besar, di antaranya industri semen, industri baja, industri pulp dan kertas, industri tekstil, keramik, pupuk, petrokimia dan industri makanan dan minuman, lalu dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu sektor pertambangan, sektor industri dasar dan bahan kimia, dan sektor barang konsumsi semua industri tersebut tergolong ke dalam perusahaan *carbon-intensive industry*.

Salah satu fenomena pengungkapan emisi karbon yaitu pelaku usaha industri yang lalai akan tanggung jawab lingkungannya. Permasalahan antara masyarakat dan perusahaan yang kerap muncul adalah masalah penanganan limbah yang mencemari lingkungan di sekitar lokasi perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang *go publik* seharusnya bekerja dengan tingkat keamanan yang baik. Dalam setiap proses di area usaha perusahaan, seharusnya menjamin keberadaan mereka tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

Selama ini perusahaan telah menerbitkan *sustainability report* yang didalamnya menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menangani dampak lingkungan yang mereka hasilkan secara kontinu,. Akan tetapi, setelah perusahaan berhasil memiliki sertifikasi ISO 14001, masih ada perusahaan yang lalai akan tanggung jawabnya terhadap isu lingkungan, seperti permasalahan pada PT Vale Indonesia Tbk, dimana sudah ada tiga Gubernur dari wilayah Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah) yang telah menyatakan tidak setuju terhadap perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun di wilayah Sulawesi, yang masa kontraknya berakhir pada 28 Desember 2025. Bahkan para kepala daerah itu lebih memilih jika konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Tuntutan tersebut merupakan pukulan bagi keberadaan perusahaan tambang nikel itu di wilayah Sulawesi. Akibat keberadaannya dianggap masih minim kontribusi ketimbang dampak buruk yang dihasilkannya terhadap lingkungan. Bahkan beberapa LSM lingkungan seperti Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan pernah mendesak manajemen PT Vale Indonesia untuk

menghentikan sementara eksploitasi produksi nikel. Karena sudah mencemari lingkungan di pesisir Pulau Mori, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur. Kerusakan lingkungan itu dianggap sudah masuk kategori parah, karena ditemukannya limbah sulfur yang masuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (B3), dan mencemari ekosistem pesisir Pulau Mori. Gunhar (2021).

Indonesia sudah menyatakan komitmennya pada *Conference of Parties* (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target *unconditional* sebesar 29% dan target *conditional* sampai dengan 41% dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) di tahun 2030.

Di Indonesia sendiri *Carbon emission disclosure* atau pengungkapan emisi karbon masih bersifat *voluntary disclosure* (sukarela) dan praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. Sedangkan menurut penelitian Wibowo et al. (2022) menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon merupakan isu yang berkembang beberapa tahun terakhir ini. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan tentang keadaan kinerja emisi karbon perusahaan, dan menekan perusahaan untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon.

Hal ini juga tertuang pada UU No. 32 tahun 2009, bahwa perusahaan harus lebih aktif dalam melaporkan informasi dan pengungkapan emisi karbon. Perusahaan meyakinkan pemangku kepentingan bahwa aktivitas perusahaan sudah

sejalan dengan harapan dari pemangku kepentingan terkait emisi karbon dalam melegitimasi perusahaan dan untuk mempertahankan kontrak sosialnya. Penelitian Desy Nur (2018) menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan adalah dengan cara mengungkapkan praktik pengelolaan karbon melalui, beberapa saluran seperti melampirkan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan situs web perusahaan. Pentingnya pengungkapan emisi karbon menjadi motivasi yang mendorong penelitian ini.

Penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Menurut Setiawan et al. (2019) salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon adalah tata kelola perusahaan, yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan komite audit. Dengan adanya proses pertanggungjawaban maupun pengungkapan dalam *sustainability report*, penting bagi perusahaan untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik serta pengawasan yang ketat agar sesuai tujuan perusahaan dan harapan *stakeholder*.

Dewan komisaris dan komite audit mempunyai peran yang begitu penting pada tata kelola suatu perusahaan, Dimana keberadaan komisaris yang semakin besar dapat memberikan pengawasan dan memastikan bahwa direksi bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal*. Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan mampu memberikan *transparansi* informasi mengenai aktivitas perusahaan. Salah satu bentuk *transparansi* tersebut adalah pengungkapan emisi karbon. Kemudian semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka akan meningkatkan koordinasi dan hubungan antar komite audit

sehingga dapat memperkuat kontrol/pengawasan terhadap manajemen yang pada akhirnya membantu meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Pada perusahaan PT Vale Indonesia Tbk memiliki ukuran dewan komisaris yang besar yaitu rata-rata sebanyak 10 anggota dewan komisaris (anggota dewan komisaris > 5), akan tetapi dewan komisaris dalam perusahaan tersebut masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengenai pengungkapan lingkungan, begitu juga dengan komite auditnya walaupun sudah melaksanakan rapat komite lebih dari 4 kali dalam setahun, akan tetapi komite audit dalam perusahaan tersebut belum maksimal dalam mengawasi dewan komisaris dalam hal pengungkapan emisi karbon sehingga menimbulkan permasalahan, seperti tuntutan yang diberikan oleh gubernur Sulawesi yang akibat keberadaannya dianggap masih minim kontribusi ketimbang dampak buruk yang dihasilkannya terhadap lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dalton et al. (2014) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris merupakan salah satu penentu tata kelola perusahaan yang penting dan efektif. Menurut penelitian Firmansyah et al. (2021) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian Niza & Ratmono (2019) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dengan proksi proporsi anggota dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK. Sedangkan menurut penelitian Puspita & Tanjaya (2022) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor kedua adalah ukuran perusahaan yang merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total aset, total penjualan maupun nilai kapitalisasi pasar. Setiap perusahaan baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar memiliki peran dalam berkontribusi menghasilkan emisi karbon. Akan tetapi, perusahaan besar mendapat perhatian lebih besar dari publik karena keberadaannya yang mudah terlihat, aktivitas operasional perusahaannya yang padat serta berdampak terhadap lingkungan, sehingga perusahaan besar lebih mendapat banyak tuntutan dari publik untuk melakukan pengungkapan emisi karbon.

Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk ini termasuk kategori perusahaan besar karena mempunyai total aset diatas 10M yaitu rata-rata sebesar 31 triliun. Akan tetapi perusahaan tersebut mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sehingga perusahaan tambang ini mendapatkan penolakan perpanjangan kontrak dari gubernur wilayah Sulawesi. Jadi perusahaan ini tidak memberikan transparansi informasi terkait lingkungan akibat dari operasional perusahaannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nastiti & Hardiningsih (2021) dan Maqfirah & Fahrianta (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan penelitian Wiratno & Fatkhudin (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Riset dilaksanakan merujuk pada riset Firmansyah et al. (2021) yakni mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Penelitian tersebut menyarankan untuk meneliti secara lebih lanjut untuk menambahkan variabel independen. Jadi,

variabel yang ditambahkan ialah variabel sertifikasi ISO 14001. Alasan saya memilih variabel tersebut karena variabel sertifikasi ISO 14001 ini sangat penting dimiliki oleh perusahaan yang aktivitas operasionalnya menghasilkan dampak tinggi terhadap lingkungan, dimana hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Majidah (2019), dan Rahmawati & Budiwati (2018).

Salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 adalah mempublikasikan pengungkapan emisi karbon pada laporan keberlanjutan perusahaannya, akan tetapi terdapat perusahaan yang belum mengungkapkan emisi karbon secara lengkap, baik terkait dengan perhitungan gas rumah kaca, total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, sumber dari emisi gas rumah kaca, strategi dalam pengurangan gas rumah kaca, bahkan sampai konsumsi energi serta rancangan biaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Khususnya pada perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Vale Indonesia Tbk dan PT. Wijaya Karya Beton Tbk dimana hanya mengungkapkan rata-rata 3 item dari 18 item yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan.

Jadi perusahaan *carbon-intensive industry* tergolong dalam perusahaan yang aktivitas operasionalnya berpengaruh tinggi terhadap lingkungan, yang mana hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi ISO 14001 ini dijadikan konsep manajemen lingkungan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan perannya dalam menghadapi kegiatan operasional perusahaan yang memiliki dampak tinggi terhadap lingkungan. Melalui konsep manajemen lingkungan yaitu ISO 14001 yang merupakan pedoman dan kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang disertifikasi serta mendukung dalam hal pengungkapan lingkungan dan pelestarian lingkungan oleh perusahaan.

Maka dari itu penulis mencoba untuk membuktikan pengaruh langsung sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon. Sertifikasi ISO 14001 pada penelitian Rahmawati & Budiwati (2018) menunjukkan hubungan positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan Sertifikasi ISO 14001 pada penelitian Anggraini & Handayani Susi (2021) menunjukkan hubungan negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Sebagai motivasi yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan terdapat permasalahan pada variabel tata kelola perusahaan (dengan proksi ukuran dewan komisaris dan komite audit), ukuran perusahaan, dan sertifikasi ISO 14001. Maka dari itu penulis ingin menguji kembali ketiga variabel tersebut. Penulis juga memperluas sampel penelitian sebelumnya yang hanya pada perusahaan sektor manufaktur tertentu menjadi perusahaan *carbon-intensive industry*.

Perusahaan *carbon-intensive industry* dipilih karena perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi intensif memiliki kecenderungan untuk lebih banyak mengungkapkan aktivitas emisinya atau tanggung jawab sosialnya secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan perusahaan non-intensif. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas utama perusahaan intensif yang lebih berpotensi membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan intensif akan lebih pro-aktif dalam menghadapi masalah lingkungan karena tipe ini lebih banyak mendapat tekanan dari pihak eksternal daripada perusahaan non-intensif dalam hal menginformasikan emisi yang dihasilkan serta kiat-kiat untuk menanggulangnya, sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh penelitian Ramadhani & Venusita (2020).

Perusahaan yang tergolong *carbon intensive industry* adalah perusahaan yang tergolong ke dalam 8 sub sektor yang telah dijelaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perindustrian, di antaranya industri semen, industri baja, industri pulp dan kertas, industri tekstil, keramik, pupuk, petrokimia dan industri makanan dan minuman lalu dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu sektor pertambangan, sektor industri dasar dan bahan kimia, dan sektor barang konsumsi.

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai pengungkapan emisi karbon utamanya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Implikasi yang juga diharapkan adalah menjadi sumber referensi bagi manajemen perusahaan dalam menentukan perencanaan terkait pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menguji secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka dari itu judul yang penulis ajukan ialah **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Sertifikasi ISO 14001 Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. *Global Warming* atau pemanasan global adalah suatu permasalahan yang menjadi perhatian publik selain pandemi covid-19.
2. Perubahan iklim merupakan salah satu akibat dari keberadaan emisi yang terus menerus meningkat dari aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia.

3. Pendorong terbesar dari keseluruhan dari emisi gas rumah kaca adalah emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar. Sektor pembangkit listrik adalah kontributor terbesar yaitu sebanyak 35%, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi masing-masing sebesar 27%.
4. Aktivitas industri merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya pemanasan global. Pertumbuhan industri yang semakin pesat sejalan dengan semakin meningkatnya emisi karbon yang bersumber dari aktivitas operasi perusahaan.
5. Sedikitnya ada delapan sektor industri sebagai penyumbang emisi karbon dalam jumlah besar, di antaranya industri semen, industri baja, industri pulp dan kertas, industri tekstil, keramik, pupuk, petrokimia dan industri makanan dan minuman, semua industri tersebut tergolong ke dalam perusahaan *carbon-intensive industry*.
6. Selama ini perusahaan telah menerbitkan *sustainability report* yang didalamnya menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menangani dampak lingkungan yang mereka hasilkan secara kontinu, salah satunya yaitu untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001. Akan tetapi, setelah perusahaan berhasil memiliki sertifikasi ISO 14001, masih ada perusahaan yang lalai akan tanggung jawabnya terhadap isu lingkungan.
7. Di Indonesia sendiri *Carbon emission disclosure* atau pengungkapan emisi karbon masih bersifat *voluntary disclosure* (sukarela) dan praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberi fokus penelitian pada pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon dengan objek penelitian yakni perusahaan *carbon-intensive industry* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Informasi mengenai masing-masing variabel independen diperoleh melalui laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan pada tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah sertifikasi ISO 14001 memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon.

2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu penelitian ini juga diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya akuntansi karbon atau akuntansi sosial dan lingkungan serta konsistensi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kualitas *carbon emission disclosure* atau pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan sertifikasi ISO 14001 terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan kata lain, manajemen perusahaan yang hendak melakukan pengungkapan

emisi karbon atas aktivitas operasionalnya sebaiknya memperhatikan faktor-faktor tersebut.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*feedback*) serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam mengungkap emisi karbon. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperustakaan bagi peneliti kedepannya serta memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris terkait pengungkapan emisi karbon.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengungkapan emisi karbon atau tingkat kepedulian perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait dengan emisi karbon. Selain itu diharapkan bisa membuka wawasan masyarakat awam terkait isu-isu lingkungan saat ini.